



Laut sebagai Lanskap Budaya: Integrasi Kearifan Lokal dan Ekowisata Bahari di Kepulauan Kecil Maluku

Williem Bernadus Titing, Afdhal, Rais Rahman Haulussy
Universitas Pattimura

Kata Kunci	Abstrak
Lanskap Budaya Laut Kearifan Lokal Ekowisata Komunitas Pulau Kecil Sosiologi Pariwisata	<p>Artikel ini mengkaji integrasi kearifan lokal dan ekowisata bahari dalam kerangka “lanskap budaya laut” (<i>cultural seascapes</i>) di komunitas pulau kecil di Maluku, dengan fokus studi di Negeri Hukurila, Kota Ambon. Tujuan kajian ini adalah membangun pemahaman holistik tentang bagaimana ruang laut dimaknai secara sosial, budaya, dan spiritual, serta bagaimana makna tersebut membentuk arah pengembangan ekowisata berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi partisipatif, melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi praktik lokal seperti sasi laut, ritual maritim, dan pengelolaan adat pesisir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laut tidak hanya dipahami sebagai ruang ekonomi, tetapi sebagai lanskap budaya yang sarat nilai lokal. Masyarakat berperan aktif sebagai agen dalam pengelolaan pariwisata, bukan semata objek wisata. Konsep <i>cultural seascapes</i> yang dikembangkan secara kontekstual ini menawarkan pendekatan baru dalam memahami hubungan manusia-laut di wilayah kepulauan kecil, dengan mengintegrasikan sosiologi pariwisata, antropologi budaya, dan ekologi politik laut. Temuan ini memberikan kontribusi kebaruan terhadap studi sosiologi di Indonesia timur yang masih terpinggirkan, serta merekomendasikan perlunya penguatan komunitas lokal dan pendekatan interdisipliner dalam perumusan kebijakan pariwisata maritim.</p>



Cultural Seascapes: Integrating Local Wisdom and Marine Ecotourism in Small Island Communities of Maluku

Williem Bernadus Titing, Afdhal, Rais Rahman Haulussy
Universitas Pattimura

Kata Kunci	Abstrak
Pela Bola Cultural Capital Religious Conflict Reconciliation Social Harmony Local Wisdom	This article examines the integration of local wisdom and marine ecotourism within the framework of “ <i>cultural seascapes</i> ” in small island communities in Maluku, with a focus on Negeri Hukurila, Ambon. The study aims to develop a holistic understanding of how the sea is socially, culturally, and spiritually perceived and managed by local communities and how such meanings shape sustainable ecotourism development. Employing a qualitative approach with participatory ethnographic methods, the research includes in-depth interviews, participant observation, and documentation of local practices such as sasi laut, maritime rituals, and customary coastal governance. Findings reveal that the sea is not merely viewed as an economic space but as a cultural landscape embedded with local values. Local communities actively participate as agents in managing tourism rather than being passive objects of the industry. The contextual development of the “ <i>cultural seascapes</i> ” concept offers a novel approach to understanding human-marine relationships in small island settings, integrating tourism sociology, cultural anthropology, and political ecology. This study contributes to the advancement of sociological inquiry in eastern Indonesia—an often-overlooked region—and recommends strengthening local community roles and adopting interdisciplinary, culturally sensitive frameworks in maritime tourism policymaking.

Log Kegiatan Naskah

Pengiriman Naskah (<i>Submission</i>)	2025-05-25
Review	2025-05-27 2025-06-01
Revisi (<i>Revision</i>)	2025-06-22 2025-06-23 2025-06-24
Naskah Diterima (<i>Submission Accepted</i>)	2025-06-28
Penerbitan (<i>Publication</i>)	2025-06-30



Artikel ini diterbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International. Untuk meninjau salinan lisensi ini, kunjungi laman <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

Pendahuluan

Di banyak wilayah kepulauan di Indonesia—salah satunya kepulauan di Maluku—laut bukan sekadar bentang alam atau sumber ekonomi, melainkan juga ruang hidup yang sarat makna kultural dan spiritual (Akapip, 2023; Soselisa et al., 2024). Namun, dalam dinamika pembangunan pariwisata, terutama ekowisata, aspek budaya maritim lokal kerap terpinggirkan atau justru dikomodifikasi tanpa pemahaman yang utuh (Afdhal, 2023; Hutabarat et al., 2023). Hal ini menjadi permasalahan pokok dalam pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk di wilayah Maluku, yang secara historis dan sosial memiliki kedekatan mendalam dengan laut sebagai poros kehidupan. Di Negeri Hukurila, sebuah komunitas pesisir di Kota Ambon, praktik adat seperti *sasi laut*, upacara maritim, hingga sistem pengelolaan laut berbasis komunitas masih hidup dan dijalankan. Tetapi, dalam geliat pariwisata yang semakin masif, muncul pertanyaan penting tentang bagaimana masyarakat lokal dapat mempertahankan nilai-nilai budaya tersebut sembari berperan aktif dalam pembangunan ekowisata.

Relevansi kajian ini makin kuat ketika kita melihat data penelitian Praptiwi et al. (2021) dan Utama et al. (2024) yang menunjukkan bahwa lebih dari 70% wilayah Indonesia adalah lautan, namun hanya sebagian kecil dari kebijakan pariwisata bahari yang mempertimbangkan aspek sosial budaya lokal secara serius. Banyak studi terdahulu lebih menyoroti dimensi ekologis (Karyadi et al., 2024; Lukman et al., 2025; Wali, 2024) atau ekonomi (Akapip, 2023; Hunihua, 2023; Rusli et al., 2023) dari pengelolaan laut dan ekowisata. Misalnya, data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Kabupaten Wakatobi mengalami peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata bahari sebesar 18% selama periode 2020–2023, yang disertai dengan penurunan angka kemiskinan sebesar 2,4% dalam periode yang sama. Di sisi lain, Kabupaten Raja Ampat mencatat kenaikan PAD dari pariwisata bahari sebesar 22% sejak 2019, namun ketimpangan sosial justru meningkat karena sebagian besar keuntungan masih terkonsentrasi pada pelaku usaha luar daerah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kontribusi ekonomi dari sektor pariwisata bahari cukup signifikan, distribusi manfaatnya belum merata. Dalam konteks ini, dimensi sosial dan kultural, khususnya yang berkaitan dengan masyarakat adat pesisir, masih minim dielaborasi secara mendalam. Padahal, di wilayah pulau-pulau kecil, identitas budaya masyarakat nyaris tidak bisa dipisahkan dari laut, sehingga pengabaian aspek ini dapat menimbulkan ketegangan sosial dan eksklusivitas dalam pembangunan berbasis wisata bahari. Sementara itu, dimensi sosial dan kultural, khususnya yang berkaitan dengan masyarakat adat pesisir, masih minim dielaborasi secara mendalam. Padahal, dalam konteks pulau-pulau kecil, identitas budaya masyarakat nyaris tidak bisa dipisahkan dari laut.

Beberapa penelitian telah mencoba menjembatani hubungan antara masyarakat lokal dan pariwisata berkelanjutan. Misalnya, penelitian Lukman et al. (2025), Rusli et al. (2023), dan Sabandar (2025) yang menekankan pentingnya pemberdayaan komunitas dalam pengembangan pariwisata. Penelitian lain oleh Fazlin et al. (2024) dan Hidayati & Siregar (2024) mengungkap dinamika antara budaya lokal dan industri pariwisata global yang sering kali menghasilkan ketegangan. Studi oleh Andriyanto et al. (2024), Mailoa et al. (2023), dan Wicaksono et al. (2024) telah menyoroti praktik pariwisata berbasis budaya lokal. Namun, meskipun telah ada berbagai studi tentang budaya dan pariwisata, sebagian besar masih terpisah dari dinamika ekologis dan spiritual yang menyatu dalam kehidupan masyarakat pesisir di Indonesia timur.

Konsep *cultural landscape*, yang sudah banyak digunakan dalam studi geografi budaya seperti penelitian Paniagua (2021) dan Terkenli (2024), pada dasarnya dapat diperluas menjadi *cultural seascape*, yakni lanskap budaya yang tidak berhenti di daratan, tetapi juga mencakup laut dan ruang-ruang hidup maritim. Jiang & Xu (2021) dan Zheng et al. (2023) telah membuka jalan untuk membicarakan ruang-ruang kehidupan non-darat secara kultural. Namun, kajian ini masih belum banyak dikembangkan dalam konteks lokal Indonesia, khususnya di wilayah timur yang kaya dengan kearifan kelautan. Beberapa studi yang menyentuh aspek ini, seperti karya Maulidyna et al. (2021) dan Nur et al. (2023) di Sulawesi Selatan, menunjukkan potensi besar untuk menggali narasi budaya laut dari sudut pandang masyarakat lokal. Tetapi, belum ada pendekatan

yang secara eksplisit menggabungkan kearifan lokal, spiritualitas laut, dan pariwisata berbasis komunitas ke dalam satu kerangka konseptual yang utuh di wilayah Maluku.

Dalam konteks itulah, terdapat ruang yang belum banyak disentuh oleh studi-studi sebelumnya—yakni bagaimana konsep *cultural seascapes* dapat dikembangkan secara kontekstual di Maluku, tidak hanya sebagai kerangka analisis, tetapi juga sebagai narasi hidup masyarakat yang menyatu dengan laut. Ada dimensi spiritual, ekologis, dan sosial yang tidak dapat dipisahkan ketika masyarakat memandang laut sebagai bagian dari dirinya. Tidak hanya sebagai sumber daya, tetapi sebagai ruang relasi dan eksistensi. Sementara sebagian besar kajian tentang pariwisata laut masih berada dalam paradigma ekonomi atau konservasi, penelitian ini mencoba berjalan di lorong yang berbeda: menggali dimensi makna dan agensi komunitas lokal dalam mengelola dan merawat laut melalui narasi-narasi kebudayaan yang hidup dalam praktik sehari-hari.

Dengan demikian, kajian ini mencoba menghadirkan cara pandang baru tentang ekowisata—bukan hanya sebagai aktivitas ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga sebagai praktik sosial-budaya yang berakar pada kearifan lokal. Melalui penelusuran terhadap praktik *sasi laut*, tata kelola adat, dan ritual maritim di Negeri Hukurila, penelitian ini menyusun sebuah pendekatan interdisipliner yang menggabungkan sosiologi pariwisata, antropologi budaya, dan ekologi politik laut. Di sinilah letak keunikan dari penelitian ini: bukan sekadar mengamati, tetapi juga memahami bagaimana masyarakat menjadi subjek utama dalam merancang narasi pariwisata mereka sendiri—dengan laut sebagai pusatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan merumuskan bagaimana integrasi antara kearifan lokal dan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat dapat dilakukan melalui pendekatan *cultural seascapes*. Tujuan ini sekaligus menjadi pintu masuk untuk memahami lebih jauh bagaimana masyarakat pesisir di pulau-pulau kecil seperti Hukurila tidak hanya mampu menjaga warisan budayanya, tetapi juga merancang masa depan sosial-ekologisnya dengan caranya sendiri.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif, yang memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam makna-makna sosial dan kultural yang hidup dalam masyarakat, khususnya dalam relasi mereka dengan laut sebagai ruang budaya. Pendekatan ini dipilih karena persoalan yang diangkat—yakni bagaimana masyarakat lokal mengintegrasikan kearifan tradisional dengan pengembangan ekowisata—bukan sekadar persoalan teknis atau kuantitatif, melainkan persoalan makna, pengalaman, dan dinamika sosial yang hanya bisa dipahami melalui kedekatan antara peneliti dan subjek kajian (Ahmad et al., 2019; Hennink et al., 2020). Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan pengalaman hidup masyarakat sebagai sumber utama data dan pengetahuan, dengan cara yang menghargai konteks lokal, dinamika relasional, dan narasi yang berkembang dari bawah.

Penelitian ini dilaksanakan di Negeri Hukurila, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon dari tanggal 27 Juli 2024–30 Agustus 2024. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada dua pertimbangan utama. Pertama, Negeri Hukurila merupakan salah satu komunitas pesisir di Maluku yang masih mempertahankan praktik-praktik budaya kelautan seperti *sasi laut*, pengelolaan adat wilayah pesisir, dan pelaksanaan ritual-ritual maritim yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Kedua, kawasan ini juga tengah berkembang sebagai salah satu tujuan ekowisata bahari di Ambon, sehingga menjadi titik temu yang menarik antara nilai-nilai budaya dan tekanan pasar pariwisata. Dengan demikian, Hukurila menjadi lokasi yang representatif untuk memahami bagaimana dinamika budaya dan pariwisata berlangsung secara simultan dan saling berpengaruh.

Dalam penelitian ini, informan dipilih secara purposif, yakni berdasarkan keterlibatan mereka dalam praktik budaya maritim dan pengembangan ekowisata di Hukurila. Total terdapat 17 informan utama, yang terdiri dari tokoh adat, nelayan yang aktif dalam komunitas *sasi*, pengelola wisata lokal, pemuda adat, serta

perangkat desa yang terlibat dalam regulasi pariwisata. Tokoh-tokoh adat dan pelaku sasi dipilih karena mereka merupakan penjaga utama nilai-nilai lokal yang berkaitan langsung dengan pengelolaan laut dan spiritualitas pesisir. Pengelola wisata dan pemuda dilibatkan untuk memahami dinamika perubahan serta strategi masyarakat dalam menjembatani antara tradisi dan tuntutan ekonomi pariwisata. Sementara itu, perangkat desa memberikan wawasan mengenai kebijakan lokal dan dukungan kelembagaan terhadap integrasi budaya dan ekowisata.

Proses pengumpulan data dilakukan selama tiga bulan dengan menggunakan metode etnografi partisipatif, yang memungkinkan peneliti untuk terlibat secara langsung dalam kehidupan masyarakat. Metode ini tidak hanya melibatkan wawancara mendalam dan observasi partisipatif, tetapi juga pelibatan dalam kegiatan adat, perjalanan laut bersama nelayan, serta pendokumentasian visual atas situs-situs budaya dan kegiatan wisata. Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur namun diarahkan pada topik-topik utama seperti makna laut, praktik sasi, persepsi terhadap wisata, dan harapan komunitas terhadap masa depan lingkungan mereka. Observasi dilakukan baik dalam kegiatan harian maupun dalam momen-momen ritual atau pertemuan adat, untuk menangkap ekspresi nilai-nilai lokal yang tidak selalu bisa diungkap melalui kata-kata.

Pemilihan metode etnografi ini tidak lepas dari tujuan utama penelitian, yakni menggali makna dan narasi yang hidup dalam masyarakat, bukan hanya sekadar mengumpulkan fakta. Seperti yang ditegaskan oleh Boromisza-Habashi (2023), pemahaman yang mendalam terhadap budaya memerlukan pendekatan yang mampu membaca “makna di balik makna,” sesuatu yang hanya bisa dicapai melalui kedekatan emosional dan keterlibatan kultural dengan masyarakat. Dalam konteks ini, peneliti tidak hanya berposisi sebagai pengamat, tetapi juga sebagai mitra dialog yang belajar dari dan bersama komunitas.

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data dan sumber. Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan informasi dari berbagai informan yang berbeda latar belakangnya, serta mengkonfirmasi data dari wawancara dengan hasil observasi dan dokumen lokal seperti peraturan adat, notulen rapat masyarakat, dan dokumen rencana pengembangan wisata desa. Selain itu, triangulasi waktu juga dilakukan dengan mengulang wawancara pada waktu yang berbeda dan dalam situasi sosial yang beragam, guna menangkap dinamika persepsi dan pengalaman yang mungkin berubah seiring konteks sosial.

Hasil dan Pembahasan

Laut sebagai Ruang Sosial dan Spiritual: Memaknai Cultural seascapes di Hukurila

Bagi masyarakat Negeri Hukurila, laut tidak semata-mata dipahami sebagai sumber daya ekonomi atau sekadar tempat mencari ikan. Desa ini merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem kehidupan, menyatu erat dengan nilai-nilai adat, sejarah komunitas, dan spiritualitas yang telah diwariskan lintas generasi. Dalam narasi masyarakat setempat, laut adalah entitas hidup yang memiliki ruh, martabat, dan etika relasional yang tidak dapat dilanggar begitu saja. Persepsi ini menjadi dasar utama mengapa pendekatan budaya dalam melihat ruang laut menjadi sangat penting, terutama dalam konteks integrasi antara kearifan lokal dan pengembangan ekowisata.

Dalam wawancara dengan seorang tokoh adat (In. T), tersirat bahwa laut adalah “tanah nenek moyang yang tidak kelihatan,” yang harus diperlakukan dengan hormat, sama halnya seperti daratan yang memiliki batas-batas adat dan pantangan-pantangan tertentu. Pengetahuan tentang batas laut adat, lokasi keramat, dan wilayah larangan diturunkan melalui lisan dari para tetua adat kepada generasi muda, dalam bentuk kisah asal-usul kampung, mitos laut, serta nasihat ritual. Informan lainnya (In. L), seorang nelayan senior,

menjelaskan bahwa sebelum melaut, mereka terbiasa memberi sesaji atau doa di tempat-tempat tertentu di pesisir, sebagai bentuk penghormatan terhadap “penghuni laut” agar diberikan keselamatan.

Hasil observasi lapangan memperkuat narasi ini. Dalam satu upacara ritual penutupan *sasi laut* di wilayah pesisir Waihokal, masyarakat berkumpul di tepi pantai dengan pakaian adat, membawa hasil laut terbaik untuk diletakkan di atas batu karang besar yang dianggap sakral. Anak-anak dan pemuda berdiri berjajar di belakang para tetua, menyaksikan dengan tenang saat doa adat dibacakan. Laut tidak diposisikan sebagai latar belakang upacara, tetapi sebagai subjek yang dihormati. Dari ekspresi wajah dan sikap tubuh peserta, terasa sekali kesakralan momen itu—bahwa ini bukan semata tradisi, tetapi peristiwa spiritual yang hidup dan relevan bagi mereka.

Pendekatan seperti ini sejalan dengan pemikiran dalam *blue humanities* dan *seascape epistemologies*, yang menekankan pentingnya menggeser cara pandang kita terhadap laut dari sesuatu yang objektif dan material menuju sesuatu yang subjektif dan kultural (Boswell, 2022; Fusar-Poli et al., 2023). Dalam kerangka ini, laut dipahami sebagai lanskap kultural yang memuat makna, simbol, dan sejarah komunitas. Laut adalah tempat berlangsungnya kehidupan sosial, ruang naratif, serta arena spiritual yang membentuk identitas kolektif masyarakat pesisir.

Cultural seascapes, dalam konteks Hukurila, tidak hanya berisi representasi simbolik tentang laut, tetapi juga struktur sosial yang aktif. Misalnya, pembagian wilayah laut secara adat memuat struktur otoritas yang jelas—siapa yang boleh melaut di mana, kapan, dan dengan cara apa. Ini bukan sekadar regulasi sumber daya, melainkan perwujudan pengetahuan ekologis yang diselimuti oleh nilai moral dan etika spiritual. Dalam konteks itu, laut juga menjadi arena pengasuhan nilai: anak-anak diajarkan untuk tidak bersuara keras di laut, tidak membuang sampah sembarangan, serta tidak mengambil ikan lebih dari yang dibutuhkan. Semua ini berakar pada keyakinan bahwa laut mendengar dan memiliki kehendak.

Niaragh et al. (2022) menyatakan bahwa lanskap bukan hanya tentang ruang fisik, tetapi juga tentang cara manusia berjalan dan hidup di dalamnya, memberi penguatan pada narasi ini. Laut, seperti halnya darat, adalah lanskap yang ditempuh secara simbolik dan eksistensial. Di Hukurila, laut bukanlah sesuatu yang terpisah dari manusia, tetapi bagian dari tubuh sosial mereka, bagian dari rumah. Dari pengamatan sehari-hari, terlihat pula bagaimana relasi sosial terbentuk dari aktivitas kelautan. Para nelayan bekerja dalam kelompok kecil yang sudah terjalin selama bertahun-tahun, dengan sistem pembagian hasil yang lebih mengedepankan solidaritas daripada keuntungan. Di warung kopi dekat pelabuhan kecil, percakapan tentang hasil tangkapan diselipi dengan cerita-cerita mitos, diskusi adat, dan nasihat-nasihat moral. Di sinilah terlihat bahwa laut bukan hanya memberi ikan, tetapi juga merawat ingatan kolektif dan kebersamaan. Pemaknaan laut sebagai ruang sosial dan spiritual di Hukurila menjadi inti dari kerangka *cultural seascapes* yang dikembangkan dalam kajian ini. Ia menunjukkan bahwa laut bukan hanya lanskap fisik yang dikelola, tetapi juga lanskap kultural yang dihuni secara simbolik, sosial, dan spiritual. Inilah dasar yang memungkinkan integrasi antara kearifan lokal dan ekowisata tidak menjadi tumpang tindih atau eksploitatif, melainkan koheren dan berakar.

Sasi Laut dan Tata Kelola Adat: Modal Sosial dalam Ekowisata Berbasis Komunitas

Di pesisir Hukurila, praktik *sasi laut* bukanlah sekadar bentuk pelarangan sementara terhadap pengambilan hasil laut, melainkan manifestasi nilai-nilai sosial dan kultural yang membentuk jantung dari tata kelola sumber daya alam komunitas. Sasi adalah sistem adat yang mengatur larangan memanen sumber daya tertentu dalam kurun waktu tertentu, untuk memberikan ruang bagi pemulihan ekologis. Namun di balik fungsi ekologisnya, sasi adalah struktur sosial yang kompleks, yang dijalankan melalui mekanisme musyawarah, ritual, dan pengawasan sosial, menjadikannya sebagai wujud nyata dari modal sosial yang kuat dalam komunitas.

Proses pemberlakuan sasi di Hukurila dilakukan melalui pertemuan adat yang melibatkan tokoh adat, pemuka agama, dan perwakilan warga. Kesepakatan kemudian diumumkan secara terbuka dan ditandai dengan pemasangan simbol larangan di wilayah laut tertentu, seperti dahan pohon atau bendera merah. Selama masa sasi, masyarakat secara kolektif mematuhi larangan tersebut, bukan karena tekanan hukum formal, tetapi karena kesadaran moral dan sosial yang dibangun dari relasi komunitarian. Dalam salah satu wawancara, seorang tetua adat (In. M) menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap sasi dianggap sebagai pelanggaran terhadap seluruh komunitas dan leluhur, bukan sekadar terhadap peraturan.

Hal ini memperlihatkan bahwa sasi tidak berdiri sendiri sebagai instrumen konservasi, melainkan sebagai bagian dari sistem *relational governance*, yakni bentuk tata kelola yang mengedepankan relasi sosial, kepercayaan bersama, dan nilai-nilai lokal dalam pengambilan keputusan (Viljoen, 2021). Di dalam sistem ini, pengelolaan sumber daya tidak dimaknai sebagai proses birokratis atau teknokratik, tetapi sebagai proses sosial yang saling mengikat antara manusia, alam, dan kepercayaan budaya. Relasi yang dibangun dalam praktik sasi merefleksikan jaringan tanggung jawab bersama, yang memperkuat kohesi sosial serta mendorong keterlibatan aktif warga dalam menjaga lingkungan hidup mereka.

Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa penerapan sasi memiliki efek langsung terhadap kualitas sumber daya laut di Hukurila. Dalam kawasan yang diberlakukan sasi, seperti di pesisir Batu Kora, terlihat adanya peningkatan jumlah biota laut seperti ikan karang dan teripang. Nelayan setempat (In. S) mengakui bahwa setelah masa sasi dibuka, hasil tangkapan lebih melimpah dan bervariasi. Selain itu, adanya rasa memiliki terhadap laut membuat warga lebih waspada terhadap praktik-praktik merusak seperti penggunaan bom ikan atau alat tangkap tidak ramah lingkungan.

Pengaruh sosial dari sasi juga terlihat dalam proses pembelajaran nilai kolektif dan kontrol sosial. Anak-anak dan remaja diajak mengikuti ritual pembukaan dan penutupan sasi, menyerap nilai-nilai penghormatan terhadap alam dan pentingnya menahan diri untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, sasi menjadi ruang edukatif yang membentuk generasi muda agar memiliki etika lingkungan berbasis lokal. Tidak hanya itu, kehadiran sasi juga memperkuat posisi lembaga adat dalam struktur sosial, memberi mereka legitimasi untuk berperan aktif dalam agenda pembangunan, termasuk dalam pengembangan ekowisata berbasis komunitas.

Tabel 1. Integrasi fungsi ekologis dan sosial dari sasi

Aspek	Fungsi Ekologis	Fungsi Sosial
Mekanisme Pelarangan	Memberi waktu pemulihan bagi sumber daya laut	Menumbuhkan kesadaran kolektif dan etika relasi manusia-alam
Aktor Pengelola	Komunitas lokal (nelayan, tokoh adat)	Penguatan legitimasi sosial lembaga adat
Efek Jangka Panjang	Keanekaragaman hayati meningkat	Kohesi sosial dan kontrol sosial berbasis nilai budaya
Peran dalam Wisata	Lokasi konservasi wisata laut	Media edukasi budaya dan lingkungan bagi wisatawan

Sumber: Hasil analisis peneliti, 2025

Integrasi sasi pada Tabel 1 dalam ekowisata laut tercermin dalam bagaimana kawasan yang dikenai sasi dijadikan sebagai titik edukasi dan interpretasi budaya dalam program wisata. Wisatawan diperkenalkan pada konsep sasi melalui penuturan pemandu lokal yang juga merupakan anggota komunitas adat. Mereka

tidak hanya diajak melihat keindahan alam, tetapi juga dikenalkan pada nilai-nilai lokal yang menjaga harmoni ekologis. Salah satu kelompok wisata lokal bahkan mengembangkan paket “Wisata Sasi”, yang mengombinasikan aktivitas snorkeling di kawasan konservasi dengan sesi diskusi dan kunjungan ke rumah adat.

Melalui praktik sasi, terlihat bagaimana pengelolaan lingkungan hidup dan penguatan sosial tidak bisa dipisahkan. Modal sosial yang terbentuk dari ketaatan terhadap sasi adalah kekuatan komunitas yang tidak hanya menjaga alam, tetapi juga memperkuat otonomi lokal dalam menghadapi tekanan globalisasi pariwisata. Ini menunjukkan bahwa pengembangan ekowisata berbasis komunitas bukan dimulai dari infrastruktur, melainkan dari kepercayaan dan praktik kolektif yang telah hidup dalam masyarakat.

Ekowisata sebagai Ruang Tawar Masyarakat: Dari Objek Menjadi Subjek

Dalam beberapa dekade terakhir, pariwisata di wilayah pesisir dan pulau kecil Indonesia sering kali mengukuhkan posisi masyarakat lokal sebagai objek—penyedia tontonan budaya dan jasa murah bagi wisatawan luar. Namun, di Negeri Hukurila, Ambon, pola itu mulai bergeser. Temuan lapangan menunjukkan bahwa masyarakat kini tidak lagi sekadar menyesuaikan diri dengan permintaan pasar pariwisata, melainkan mulai membentuk, memaknai, dan bahkan mengarahkan sendiri arah perkembangan ekowisata di wilayah mereka. Proses ini mencerminkan bangkitnya *agency* atau daya tawar komunitas dalam mengelola ruang wisata sebagai bagian dari ruang hidup dan identitas kolektif.

Dalam pandangan Dolezal & Novelli (2022) dan Moayerian et al. (2022), masyarakat lokal memiliki kapasitas untuk mencipta, memutuskan, dan mengelola model wisata yang selaras dengan kebutuhan dan nilai-nilai mereka sendiri. Pendekatan ini menolak pandangan *top-down* dalam pembangunan wisata yang cenderung menyingkirkan suara lokal, dan sebaliknya menekankan pentingnya partisipasi substantif dan otentik dari warga sebagai pemilik ruang dan pengetahuan lokal. Di Hukurila, pemahaman ini tidak hanya menjadi teori, tetapi telah hidup dalam praktik sehari-hari masyarakat.

Dalam wawancara dengan salah satu tokoh pemuda setempat (In. R), terungkap bahwa pendirian kelompok wisata lokal bukan sekadar untuk mencari keuntungan ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan budaya. Menurutnya, wisatawan yang datang harus “belajar tentang laut, bukan hanya berenang di laut.” Karena itu, kelompoknya merancang paket wisata yang tidak hanya menyuguhkan pemandangan, tetapi juga pengalaman kultural seperti mengikuti prosesi ritual laut, belajar tentang sasi, serta mendengar cerita leluhur tentang asal-usul kampung dari para tetua. Pendekatan ini tidak hanya memberi nilai tambah pada wisata, tetapi juga menjadi media edukasi lintas budaya yang memperkuat identitas lokal di hadapan dunia luar.

Observasi lapangan menunjukkan bahwa proses pengelolaan ekowisata di Hukurila dilakukan secara kolektif dan bertumpu pada nilai-nilai gotong royong. Dalam satu kegiatan penyambutan wisatawan, misalnya, terlihat keterlibatan lintas generasi: para ibu menyiapkan makanan tradisional seperti *kasbi rebus* (singkong rebus), *ikan asar* (ikan cakalang asap), dan *papeda deng ikang kuah kuning* (papeda dengan ikan kuah kuning). Bahan-bahan makanan ini sebagian besar berasal dari desa sendiri—kasbi dipanen dari kebun masyarakat lokal, ikan cakalang diperoleh dari nelayan setempat, dan bumbu kuah kuning seperti kunyit, serai, dan daun jeruk juga ditanam di pekarangan warga. Sementara itu, para pemuda berperan sebagai pemandu wisata, dan tetua adat memimpin ritual penyambutan laut yang sarat simbolisme budaya. Tidak ada satu pihak yang mendominasi, melainkan semua memiliki peran sesuai dengan fungsinya. Keberadaan rumah adat sebagai tempat berkumpul dan titik awal tur budaya memperlihatkan bahwa wisata dirancang sebagai perpanjangan dari ruang sosial masyarakat, bukan ruang komersial yang terpisah.

Model wisata yang dikembangkan juga berlandaskan pada prinsip keberlanjutan sosial dan budaya. Beberapa kelompok wisata, misalnya, secara terbuka menolak permintaan wisatawan yang ingin mengadakan pesta laut atau kegiatan hiburan malam yang bertentangan dengan norma lokal. Dalam diskusi komunitas, disebutkan bahwa menjaga harmoni sosial dan spiritual jauh lebih penting daripada menerima kunjungan wisatawan yang tidak menghargai adat. Keputusan ini memperlihatkan adanya kontrol sosial kolektif dalam penyaringan bentuk wisata, serta menegaskan posisi masyarakat sebagai pengendali, bukan penerima pasif.

Tabel 2. Pergeseran peran masyarakat dalam konteks ekowisata

Aspek	Sebelum	Sesudah
Posisi Masyarakat	Objek wisata, pelengkap budaya	Subjek pengelola, perancang narasi dan pengalaman wisata
Tujuan Wisata	Hiburan dan konsumsi	Edukasi budaya dan pelestarian nilai-nilai lokal
Mekanisme pengelolaan	Dimotori pihak luar	Dikelola secara kolektif berbasis komunitas
Relasi dengan wisatawan	Pelayan dan penyedia jasa	Mitra edukasi dan pertukaran kultural
Keberlanjutan	Didasarkan pada ekonomi	Berbasis pada etika, keberlanjutan sosial, dan ekologi lokal

Sumber: Hasil analisis peneliti, 2025

Transformasi pada Tabel 2 berimplikasi lebih luas terhadap struktur kekuasaan lokal. Dengan keterlibatan aktif dalam ekowisata, masyarakat Hukurila memperkuat otonomi mereka dalam pengambilan keputusan pembangunan. Mereka memiliki kapasitas untuk menolak proyek-proyek eksternal yang tidak sesuai dengan visi lokal. Dalam salah satu pertemuan adat, misalnya, warga secara mufakat menolak tawaran investor yang ingin membangun resor di kawasan pesisir yang dianggap sakral. Keputusan ini dilandasi oleh kesadaran bahwa mempertahankan kedaulatan atas ruang adalah bentuk kedaulatan atas kehidupan mereka sendiri.

Pendekatan berbasis komunitas dalam ekowisata Hukurila memberikan pelajaran penting dalam pengembangan wisata di wilayah-wilayah adat dan pesisir. Bukan hanya tentang bagaimana melibatkan masyarakat, tetapi bagaimana menempatkan mereka sebagai aktor utama yang memiliki visi, etika, dan narasi sendiri. Seperti yang ditegaskan oleh Dolezal & Novelli (2022), bentuk pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan adil hanya mungkin terjadi jika masyarakat lokal memimpin arah perubahan—dan bukan sekadar menyesuaikan diri dengannya.

Tantangan dan Negosiasi: Ekowisata di Persimpangan Tradisi dan Pasar

Ekowisata di Negeri Hukurila tidak berkembang dalam ruang yang steril. Ia tumbuh dan bergerak di antara dua kutub tarik-menarik: nilai-nilai tradisional yang telah mengakar selama berabad-abad, dan dinamika pasar pariwisata modern yang sering kali membawa logika komodifikasi. Ketegangan antara keduanya tidak hanya menjadi latar dari praktik ekowisata, tetapi juga medan negosiasi sosial dan kultural yang kompleks. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa masyarakat Hukurila tidak serta-merta menolak pengaruh luar, namun melakukan proses seleksi, adaptasi, dan reinterpretasi terhadap bentuk-bentuk pariwisata yang masuk ke dalam ruang hidup mereka.

Salah satu bentuk ketegangan yang muncul adalah dalam penyelenggaraan atraksi budaya bagi wisatawan. Beberapa agen wisata luar kerap mengusulkan agar ritual adat laut dipentaskan secara reguler untuk wisatawan. Namun, komunitas adat Hukurila menolak gagasan tersebut karena dianggap menyalahi prinsip sakralitas dan ritus. Dalam sebuah percakapan dengan tokoh adat (In. S), dijelaskan bahwa “ritual itu bukan tontonan, tapi bagian dari hubungan kami dengan laut dan leluhur. Tidak bisa dipentaskan sembarangan.” Pandangan ini mencerminkan adanya garis batas yang tegas antara nilai kultural dan permintaan pasar. Namun menariknya, masyarakat tetap membuka diri untuk berbagi makna dari ritual tersebut melalui penjelasan naratif dan edukatif, bukan melalui pentas imitasi.

Hal serupa juga terlihat dari observasi lapangan saat berlangsungnya kegiatan wisata bahari di akhir pekan. Wisatawan diizinkan mengikuti tur laut dan mendengar penjelasan tentang sasi atau larangan adat, tetapi mereka tidak diizinkan masuk ke wilayah laut yang sedang ditutup. Pemandu lokal menjelaskan bahwa ada bagian-bagian laut yang “tidak untuk disentuh, bahkan oleh kami sendiri, apalagi orang luar.” Ini menunjukkan bahwa masyarakat bukan hanya menegosiasikan bentuk atraksi, tetapi juga ruang geografis dan spiritual mana yang dapat diakses wisatawan, dan mana yang tidak. Praktik semacam ini adalah wujud nyata dari *cultural resilience* (ketahanan budaya), yaitu kemampuan untuk mempertahankan inti nilai budaya di tengah perubahan eksternal (Matakena et al., 2024).

Namun, proses negosiasi tidak selalu mulus. Masuknya aktor-aktor eksternal seperti investor dan biro wisata kadang menimbulkan perdebatan internal di tingkat komunitas. Investor yang dimaksud umumnya bergerak di bidang penyediaan fasilitas penginapan, pembangunan kafe pantai, serta penyewaan perahu wisata. Ada kalangan yang melihat potensi keuntungan ekonomi jangka pendek, sementara yang lain khawatir terhadap dampak jangka panjang terhadap struktur sosial dan kultural masyarakat. Dalam satu pertemuan komunitas yang kami ikuti, terlihat jelas dinamika ini. Beberapa warga muda menyuarakan perlunya kerja sama dengan pihak luar untuk mengembangkan infrastruktur wisata, sementara para tetua mengingatkan tentang “harga yang harus dibayar” ketika terlalu tergantung pada modal eksternal. Proses ini bukan semata konflik, tetapi bagian dari diskusi kolektif yang menjadi ruang artikulasi nilai dan strategi keberlanjutan.

Dalam konteks ini, pendekatan *cultural resilience and adaptive capacity* sebagaimana dikembangkan oleh Gabriel-Campos et al. (2021) sangat relevan. Pendekatan ini menekankan bahwa kemampuan beradaptasi tidak berarti tunduk pada tekanan eksternal, tetapi mencakup upaya mempertahankan esensi budaya sambil menyesuaikan praktik sosial secara kreatif. Masyarakat Hukurila, dalam hal ini, menunjukkan kapasitas adaptif yang tinggi. Mereka menolak bentuk pariwisata yang invasif, tetapi menciptakan narasi wisata alternatif yang tetap atraktif namun berakar pada nilai-nilai lokal. Misalnya, paket wisata edukatif tentang sasi, tur cerita rakyat pesisir, dan kegiatan bersih pantai yang dikaitkan dengan ajaran adat tentang hubungan harmonis dengan alam.

Tabel 3. Bentuk negosiasi yang berhasil diidentifikasi

Aspek yang dinegosiasikan	Nilai tradisional	Tuntutan pasar pariwisata	Bentuk negosiasi yang ditempuh
Ritual adat	Sakral, tidak untuk dipentaskan	Tontonan eksotis untuk wisatawan	Penjelasan naratif tanpa pentas imitasi
Akses wilayah laut	Tertutup saat sesi, sakral	Ingin diakses untuk snorkeling dan <i>diving</i>	Menetapkan zona terlarang dan zona wisata
Bentuk atraksi	Edukasi nilai budaya, bukan hiburan	Butuh konten visual dan menarik	Menyediakan tur interpretatif dan pemandu budaya
Mitra pengembangan wisata	Gotong royong lokal	Investor dan biro pariwisata eksternal	Selektif dalam kerja sama, melalui musyawarah adat

Sumber: Hasil analisis peneliti, 2025

Ketegangan dan negosiasi pada Tabel 3 menjadi bukti bahwa masyarakat lokal tidak bersikap pasif menghadapi pasar. Mereka tidak sekadar bertahan, tetapi juga berinovasi dalam kerangka nilai-nilai lokal. Pilihan mereka untuk tidak menampilkan budaya sebagai komoditas, tetapi sebagai pengetahuan dan pengalaman yang harus dihargai, merupakan bentuk penguatan identitas di tengah gelombang globalisasi pariwisata. Ini adalah bentuk keberdayaan kultural yang lahir dari pemahaman mendalam akan siapa mereka dan laut seperti apa yang ingin mereka wariskan kepada generasi berikutnya.

Integrasi Pengetahuan Lokal dan Interdisiplineritas: Menuju Model Ekowisata Kontekstual

Integrasi pengetahuan lokal dan pendekatan interdisipliner dalam pengembangan ekowisata di kawasan kepulauan kecil seperti Hukurila menghadirkan sebuah paradigma baru yang menantang dominasi model-model pariwisata berbasis ekonomi semata. Dalam kerangka *cultural seascapes*, laut tidak lagi dibaca hanya sebagai sumber daya alam atau komoditas pariwisata, melainkan sebagai lanskap budaya yang memuat sistem pengetahuan lokal, nilai spiritual, serta relasi sosial yang kompleks dan hidup. Temuan lapangan di Hukurila menunjukkan bahwa masyarakat memiliki sistem pengetahuan yang tidak tertulis namun sangat terstruktur tentang ekologi laut, batas wilayah adat, musim-musim penangkapan ikan, hingga praktik ritual yang menyimbolkan keharmonisan antara manusia dan laut. Pengetahuan ini tidak berdiri sendiri, tetapi dapat diperkaya dan diperkuat melalui kolaborasi dengan ilmu-ilmu sosial dan lingkungan kontemporer.

Pendekatan interdisipliner menjadi penting karena relasi manusia-laut dalam konteks kepulauan kecil tidak bisa dipahami secara parsial. Antropologi budaya berkontribusi dalam menafsirkan makna simbolik dari praktik adat seperti *sasi laut* dan ritual maritim; sosiologi membantu memetakan struktur sosial, kohesi komunitas, dan dinamika kolektif dalam tata kelola wisata; sedangkan ekologi politik laut membuka pemahaman terhadap relasi kuasa, akses terhadap sumber daya, dan peran aktor-aktor eksternal yang masuk ke dalam ruang hidup masyarakat. Ketika ketiga pendekatan ini dipertemukan dengan narasi lokal, muncul suatu model ekowisata yang tidak hanya sensitif terhadap konteks kultural, tetapi juga adil secara ekologis dan sosial.

Integrasi ini tidak semata-mata teoritis, tetapi tercermin dalam praktik yang ditemukan di lapangan. Misalnya, ketika masyarakat menolak atraksi wisata yang meniru ritual sakral, namun tetap bersedia menjelaskan makna dan konteks budaya dari ritual tersebut kepada wisatawan, mereka sedang membangun jembatan antara pengetahuan lokal dan narasi global tentang keberlanjutan. Dalam hal ini, masyarakat Hukurila bukan hanya penerima kebijakan, melainkan menjadi aktor reflektif yang mengolah dan memediasi dua dunia pengetahuan yang sering kali berjarak. Proses ini mengarah pada pembentukan apa yang dapat disebut sebagai model ekowisata kontekstual—yakni model yang tidak dibentuk dari luar, tetapi tumbuh dari dalam, melalui artikulasi pengetahuan yang hidup dan pengalaman sosial yang otentik.

Konsep *cultural seascapes* dalam konteks ini berfungsi ganda: sebagai kerangka konseptual yang menuntun analisis dan pemahaman terhadap dinamika manusia-laut, dan sebagai strategi praksis yang memungkinkan masyarakat lokal untuk mengklaim kembali ruang, makna, dan masa depan mereka. Dalam wawancara dengan salah satu pemuka adat (In. A), tersirat pandangan bahwa “kalau laut itu hanya dianggap tempat cari uang, kita akan kehilangan banyak hal. Tapi kalau kita lihat laut sebagai bagian dari diri kita, kita akan jaga dia, dan dia jaga kita kembali.” Pernyataan ini menggambarkan bagaimana masyarakat Hukurila memahami keberlanjutan bukan dalam kerangka instrumen teknis, melainkan relasi etis dan spiritual.

Untuk memperjelas hubungan antara unsur-unsur yang membentuk model ekowisata kontekstual berbasis *cultural seascapes*, berikut ini adalah gambar yang memvisualisasikan alur integrasi antara pengetahuan lokal dan pendekatan interdisipliner.

Gambar 1. Model Ekowisata Kontekstual



Sumber: Hasil analisis peneliti, 2025

Melalui sintesis ini, jelas terlihat bahwa pembangunan ekowisata yang berkelanjutan di wilayah kepulauan kecil seperti Hukurila membutuhkan tidak hanya instrumen kebijakan atau investasi infrastruktur, tetapi pemahaman mendalam tentang lanskap budaya laut itu sendiri. *Cultural seascapes* menjadi jembatan untuk menyatukan cara pandang lokal dan global, tradisional dan ilmiah, dalam satu ruang gerak yang kolaboratif dan setara. Masyarakat lokal bukan hanya menjadi pengisi cerita dalam narasi pariwisata, tetapi menjadi narator dan sutradara dalam menentukan jalan ceritanya sendiri.

Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa integrasi kearifan lokal dalam pengembangan ekowisata maritim di komunitas pulau kecil, seperti di Negeri Hukurila, tidak hanya mungkin dilakukan, tetapi juga sangat relevan dan mendesak sebagai strategi pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan berbasis konteks. Melalui lensa *cultural seascapes*, laut terbukti dipahami oleh masyarakat setempat bukan sebagai entitas fisik semata, melainkan sebagai ruang hidup yang sarat makna sosial, spiritual, dan budaya. Relasi ini membentuk dasar dari cara masyarakat mengelola wilayah pesisir dan lautnya, termasuk melalui praktik-praktik seperti *sasi laut*, ritual maritim, serta tata kelola adat yang berorientasi pada etika timbal balik antara manusia dan alam.

Di samping itu, penelitian ini menjawab tujuan utamanya dengan menunjukkan bahwa pemaknaan sosial terhadap laut tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga merupakan modal sosial dalam membangun model ekowisata yang partisipatif. Masyarakat Hukurila tidak hanya menjadi penerima atau objek dari aktivitas pariwisata, tetapi telah memosisikan diri sebagai subjek yang aktif membentuk arah dan isi narasi wisata yang sesuai dengan nilai dan kapasitas lokal. Proses ini memperlihatkan adanya *agency* masyarakat dalam menegosiasikan dinamika antara tradisi dan tuntutan pasar, yang tidak jarang saling berbenturan. Namun, justru di titik persimpangan tersebut, kapasitas adaptif dan ketahanan budaya (*cultural resilience*) masyarakat diuji dan diperkuat.

Simpulan utama dari kajian ini adalah bahwa *cultural seascapes* dapat dijadikan sebagai pendekatan konseptual sekaligus praksis dalam pengembangan ekowisata kontekstual di wilayah kepulauan kecil. Konsep ini mampu mengakomodasi kompleksitas relasi manusia-laut dengan mempertemukan pengetahuan lokal dan pendekatan interdisipliner secara sejajar. Melalui pendekatan ini, ekowisata tidak hanya dilihat sebagai peluang ekonomi, tetapi sebagai medium untuk merawat warisan budaya, memperkuat kohesi sosial, serta memperjuangkan keadilan ekologis di wilayah yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam narasi pembangunan nasional. Temuan ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dalam kajian ilmu sosial dan humaniora, tetapi juga menawarkan rekomendasi praksis untuk kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis komunitas dalam pengelolaan pariwisata bahari di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Afdhal, A. (2023). Peran Perempuan dalam Perekonomian Lokal Melalui Ekowisata di Maluku: Tinjauan Sosio-Ekologi dan Sosio-Ekonomi. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 5(2), 208–224.
- Ahmad, S., Wasim, S., Irfan, S., Gogoi, S., Srivastava, A., & Farheen, Z. (2019). Qualitative v/s. Quantitative Research- A Summarized Review. *Journal of Evidence Based Medicine and Healthcare*, 6(43), 2828–2832. <https://doi.org/10.18410/jebmh/2019/587>
- Akapi, N. (2023). Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Membangun Ekosistem Kewirausahaan Pariwisata Bahari Berkelanjutan di Negeri Hukurila, Kota Ambon. *Populis: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 16(1), 50–64.

- Andriyanto, A., Hadiprashada, D., & Firmansyah, M. A. (2024). Transformation of The Meaning of Njalang Tradition: From A Personal Ritual To A Medium of Preservation And Cultural Tourism Among The Nasal Clan In Bengkulu. *Baileo: Jurnal Sosial Humaniora*, 2(1), 1–17.
- Boromisza-Habashi, D. (2023). Tracking the transmission of culture: a cultural discourse analysis of narratives of circulation in the US undergraduate public speaking course. *Journal of Multicultural Discourses*, 18(4), 243–261. <https://doi.org/10.1080/17447143.2024.2353018>
- Boswell, R. (2022). Salted Identities: Biocultural Heritage for a Rehumanized Ocean Management in South Africa. *Anthropology and Humanism*, 47(2), 363–380. <https://doi.org/10.1111/anhu.12402>
- Dolezal, C., & Novelli, M. (2022). Power in community-based tourism: empowerment and partnership in Bali. *Journal of Sustainable Tourism*, 30(10), 2352–2370.
- Fazlin, F., Sopacua, Y., & Nahuaway, Y. (2024). Identitas Budaya dalam Politik Pariwisata: Promosi Strategis Gua Laulawi oleh Otoritas Lokal. *Populis: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 18(2 SE-Articles). <https://doi.org/10.30598/populisvol18iss2pp221-237>
- Fusar-Poli, P., Estradé, A., Stanghellini, G., Esposito, C. M., Rosfort, R., Mancini, M., Norman, P., Cullen, J., Adesina, M., Jimenez, G. B., da Cunha Lewin, C., Drah, E. A., Julien, M., Lamba, M., Mutura, E. M., Prawira, B., Sugianto, A., Teressa, J., White, L. A., ... Maj, M. (2023). The lived experience of depression: a bottom-up review co-written by experts by experience and academics. *World Psychiatry*, 22(3), 352–365. <https://doi.org/10.1002/wps.21111>
- Gabriel-Campos, E., Werner-Masters, K., Cordova-Buiza, F., & Paucar-Caceres, A. (2021). Community ecotourism in rural Peru: Resilience and adaptive capacities to the Covid-19 pandemic and climate change. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 48, 416–427. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2021.07.016>
- Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2020). *Qualitative research methods*. Sage.
- Hidayati, A. F., & Siregar, Y. A. (2024). Commodification of Local Culture in The Development of Wayang Villages Tourism. *Baileo: Jurnal Sosial Humaniora*, 1(2), 176–191.
- Hunihua, R. I. (2023). Strategi Pengembangan Pariwisata Hijau: Urgensi Regulasi dan Sinergi Multisektoral di Kota Ambon. *Populis: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 16(1), 85–103.
- Hutabarat, S. V., Hutabarat, I. S., Lubis, D. S., Wardina, H., & Panggabean, Y. T. U. (2023). Study of the development of beach ecotourism based on sustainable local wisdom. *Enrichment: Journal of Management*, 12(6), 4814–4819.
- Jiang, J., & Xu, Q. (2021). Social media and political participation: A meta-analysis of current research. *Political Communication*, 38(2), 230–253. <https://doi.org/10.1080/10584609.2020.1830291>
- Karyadi, L. W., Muktasam, M., Wijayanti, I., & Hakim, L. D. R. (2024). Implementation Of Tourism Policies In The Development Of Jerowaru Tourism Village, East Lombok. *Baileo: Jurnal Sosial Humaniora*, 2(1), 107–119.
- Lukman, J. P., Yudartha, I. P. D., Dewi, N. P. D. S., Widiyanti, S., & Adristari, T. P. (2025). The Development of Cultural Ecotourism-Based Tourism: The Role of Village Governments in Managing Sustainable Tourism in Badung Regency. *Baileo: Jurnal Sosial Humaniora*, 2(2), 242–255.
- Mailoa, R. J., St K, O., & Rahanra, I. Y. (2023). Menggali Potensi Pariwisata: Inovasi Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *BAILEO: JURNAL SOSIAL HUMANIORA*, 1(1), 28–39.

- Matakena, F., Pariela, T. D., & Darakay, Y. (2024). Kosmologi Negeri dan Resiliensi Sosial Masyarakat Pulau: Upaya Pengelolaan Konflik dan Damai Keberlanjutan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 13(1), 191–201. <https://doi.org/10.23887/jish.v13i1.74987>
- Maulidyna, A., Hartawan, B. S., Agustin, H. N., Irfan, A. N., Septiasari, A., Utina, R., & Setyawan, A. D. (2021). Review: The role of local belief and wisdom of the Bajo community in marine conservation efforts. *International Journal of Bonorowo Wetlands*, 11(1). <https://doi.org/10.13057/bonorowo/w110105>
- Moayerian, N., McGehee, N. G., & Stephenson, M. O. (2022). Community cultural development: Exploring the connections between collective art making, capacity building and sustainable community-based tourism. *Annals of Tourism Research*, 93, 103355. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.annals.2022.103355>
- Niaragh, E. K., Hemmati, M., Forouzandeh, M., Mansouri, S. A., & Rezaei, N. (2022). *Landscape: A Holistic Approach to Space BT - Transdisciplinarity* (N. Rezaei (ed.); pp. 401–415). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-94651-7_19
- Nur, M., Nurbayani K, S., Mulyana, A., Dermawan, W., Sapriya, Supriyadi, A., & Jumadi. (2023). Maritime History and Culture in Indonesia: Implementation in Social Studies Learning. *Encounters in Theory and History of Education*, 24, 230–253. <https://doi.org/10.24908/encounters.v24i0.16705>
- Paniagua, A. (2021). Countryside, landscape and heritage in (new) historical Geography: Some considerations in the current geographical tendencies. *AIMS Geosciences*, 7(3), 291–299. <https://doi.org/10.3934/geosci.2021017>
- Praptiwi, R. A., Maharja, C., Fortnam, M., Chaigneau, T., Evans, L., Garniati, L., & Sugardjito, J. (2021). *Tourism-Based Alternative Livelihoods for Small Island Communities Transitioning towards a Blue Economy*. In Sustainability (Vol. 13, Issue 12). <https://doi.org/10.3390/su13126655>
- Rusli, A. A., Tuanaya, W., & de Fretes, J. (2023). Kolaborasi Multi-aktor dalam Ekowisata Mangrove: Transformasi Sosial dan Ekonomi Berbasis Komunitas di Desa Waiheru, Maluku. *Populis: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 16(1), 1–15.
- Sabandar, R. (2025). Strategi Komunikasi Kolaboratif Berbasis Partisipasi Pemuda dalam Penguatan Citra Destinasi Wisata di Pantai Nam Indah, Maluku. *Populis: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 19(2 SE-Articles). <https://doi.org/10.30598/populisvol19iss2pp229-244>
- Soselisa, P. S., Alhamid, R., & Rahanra, I. Y. (2024). Integration of Local Wisdom and Modern Policies: The Role of Traditional Village Government In The Implementation of Sasi In Maluku. *Baileo: Jurnal Sosial Humaniora*, 2(1), 63–75. <https://doi.org/10.30598/baileofisipvol2iss1pp63-75>
- Terkenli, T. S. (2024). *Tourism and Landscape*. In *The Wiley Blackwell Companion to Tourism* (pp. 166–180). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781119753797.ch12>
- Utama, I. G. B. R., Suardhana, I. N., Sutarya, I. G., & Krismawintari, N. P. D. (2024). Assessing the Impacts of Overtourism in Bali: Environmental, Socio-Cultural, and Economic Perspectives on Sustainable Tourism. *TourismSpectrum: Diversity & Dynamics*, 1(2), 81–92. <https://doi.org/10.56578/tsdd010202>
- Viljoen, S. (2021). A Relational Theory of Data Governance. *The Yale Law Journal*, 131(2), 573–654. <http://www.jstor.org/stable/45400961>
- Wali, B. (2024). Transformasi Pariwisata Berbasis Ekosistem Lintas Sektor: Model Pengembangan dan Penilaian Daya Tarik Ekosistem Pariwisata di Pantai Kairatu, Maluku. *Populis: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 18(2 SE-Articles). <https://doi.org/10.30598/populisvol18iss2pp164-184>

- Wicaksono, A., Fitri, E. S. M., Anggara, T., & Sum, S. (2024). The One-Gate Management System And Temple Conservation: A Comparative Study Of Borobudur And Angkor Wat Temples. *Baileo: Jurnal Sosial Humaniora*, 2(2), 159–175. <https://doi.org/10.30598/baileofisipvol2iss2pp159-175>
- Zheng, S., Yang, S., Ma, M., Dong, J., Han, B., & Wang, J. (2023). Linking cultural ecosystem service and urban ecological-space planning for a sustainable city: Case study of the core areas of Beijing under the context of urban relieving and renewal. *Sustainable Cities and Society*, 89, 104292. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.scs.2022.104292>